



---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk penyesuaian kembali jenis Retribusi Daerah terutama mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Berau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis atau tenaga lainnya pada dinas kesehatan, puskesmas, klinik bersalin dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik, pelayanan perizinan dan pelayanan administratif lainnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar yang mencakup wilayah tertentu termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes yang diselenggarakan secara rawat jalan maupun rawat inap.
9. Klinik Bersalin UPTD Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan khususnya kesehatan ibu dan anak.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah UPTD Dinas Kesehatan yang menyelenggara pemeriksaan penunjang medik maupun non medik.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa memerlukan menginap.
12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang memerlukan menginap.
13. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesegera mungkin untuk mencegah atau menanggulangi resiko kecacatan dan atau kematian.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang diagnosa dan terapi.
15. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan yang diberikan dengan mempergunakan alat transportasi yang dilengkapi dengan perlengkapan standar yang digunakan secara khusus untuk melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), mengevakuasi penderita/korban dan merujuk pasien.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
17. Unit Cost (biaya satuan) adalah jumlah biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan setiap pemberian pelayanan.
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diterima baik oleh orang pribadi atau badan.
19. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pungutan Retribusi.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
32. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi adalah pasien yang tidak mampu yang mempunyai kartu miskin, pasien terlantar, pasien panti asuhan, panti jompo, pasien tahanan polisi, pasien lembaga pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa termasuk bencana.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dibawah ini :

**A. PEMERIKSAAN KESEHATAN**

**Pemeriksaan Kesehatan Lainnya Dan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji**

| No | Jenis Perizinan      | Jasa Dinas | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|----------------------|------------|----------------|-----------|
| 1  | Pemeriksaan Jema'ah  |            |                |           |
|    | - Dinas              | 35,000     | 35,000         | 70,000    |
|    | - Puskesmas          | 25,000     | 35,000         | 60,000    |
| 2  | Vaksinasi Meningitis | 12,500     | 12,500         | 25,000    |
| 3  | Test Kehamilan       | 22,500     | 22,500         | 45,000    |

**B. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

| No | Jenis Pemeriksaan           | Jasa Lab | Jasa Pelayanan | Nilai   |
|----|-----------------------------|----------|----------------|---------|
| 1. | Pemeriksaan Bakteriologi    | 50,000   | 50,000         | 100,000 |
| 2. | Pemeriksaan Kimia Terbatas  |          |                |         |
|    | - pH                        | 7,500    | 7,500          | 15,000  |
|    | - Cl 2                      | 7,500    | 7,500          | 15,000  |
|    | - Fe                        | 10,000   | 10,000         | 20,000  |
|    | - Mn                        | 12,500   | 12,500         | 25,000  |
|    | - F                         | 7,500    | 7,500          | 15,000  |
|    | - Amoniak                   | 7,500    | 7,500          | 15,000  |
|    | - Nitrat                    | 7,500    | 7,500          | 15,000  |
|    | - Nitrit                    | 7,500    | 7,500          | 15,000  |
|    | - Zat Organik               | 17,500   | 17,500         | 35,000  |
|    | - Kekeruhan                 | 15,000   | 15,000         | 30,000  |
| 3. | Pemeriksaan Limbah Industri |          |                |         |
|    | - BOD                       | 50,000   | 50,000         | 100,000 |
|    | - pH                        | 50,000   | 50,000         | 100,000 |
|    | - COD                       | 50,000   | 50,000         | 100,000 |
|    | - TSS                       | 50,000   | 50,000         | 100,000 |

|    |                               |        |        |         |
|----|-------------------------------|--------|--------|---------|
| 4. | Tes Dini Narkoba              |        |        |         |
|    | - M-AMP                       | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
|    | - OPI                         | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
|    | - THC                         | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
|    | - BZO                         | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
|    | - BAR                         | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 5. | Pemeriksaan Mikroba           |        |        |         |
|    | - Makanan                     | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
|    | - Minuman                     | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 6. | Cross Check / Uji Silang      |        |        |         |
|    | - Slide Malaria               | 10,000 | 10,000 | 20,000  |
|    | - Pemeriksaan BTA + (Positif) | 5,000  | 5,000  | 10,000  |

### C. PELAYANAN PUSKESMAS

#### 1. Rawat Jalan/Rawat Inap

| No | Jenis Pelayanan   | Jasa Puskesmas | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|---|----------------|----------------|-----------|
|    | Rawat Jalan :   |                |                |           |
|    | Wilayah I   | 5,000          | 5,000          | 10,000    |
|    | - Tanjung Redeb, K Bugis  |                |                |           |
|    | Wilayah II  | 2,500          | 2,500          | 5,000     |
|    | - Teluk Bayur, Gunung Tabur, Batu Putih, Sambaliung, Biduk-biduk, Biatan, Talisayan, Tubaan, Merancang Ulu, Tanjung Batu, Pulau Derawan |                |                |           |
|    | Wilayah III   | 1,500          | 1,500          | 3,000     |
|    | - Muara Lesan, Tepian Buah, Labanan, M Payung-payung  |                |                |           |
|    | - Kunjungan Baru untuk semua wilayah  | 1,000          | 1,000          | 2,000     |

|    |   |        |         |         |
|----|---|--------|---------|---------|
|    | - Pusban Perkotaan, Rinding, Karang Ambon, Sei Bedungun | 1,500  | 1,500   | 3,000   |
|    | - Pusban Pedesaan & Poskesdes                           | 1,000  | 1,000   | 2,000   |
|    | - Kunjungan Spesialis ke semua unit                     | 1,000  | 1,000   | 2,000   |
| 2. | Rawat Inap :  |        |         |         |
|    | - Sesuai Standar Wilayah :                              |        |         |         |
|    | Wilayah I   | 5,000  | 5,000   | 10,000  |
|    | Wilayah II  | 2,500  | 2,500   | 5,000   |
|    | Wilayah III   | 1,500  | 1,500   | 3,000   |
|    | - Perawatan / Hari                                      | 7,500  | 7,500   | 15,000  |
|    | - Jasa Visite   | 7,500  | 7,500   | 15,000  |
| 3. | Puskesmas Rawat Inap Bersalin/Poskesdes                 |        |         |         |
|    | - Sesuai Standar Wilayah                                |        |         |         |
|    | Standar Wilayah :                                       |        |         |         |
|    | Wilayah I   | 5,000  | 5,000   | 10,000  |
|    | Wilayah II  | 2,500  | 2,500   | 5,000   |
|    | Wilayah III   | 1,500  | 1,500   | 3,000   |
|    | - Partus Normal   | 25,000 | 75,000  | 100,000 |
|    | - Partus Sulit  | 35,000 | 115,000 | 150,000 |
|    | - Perawatan / Hari                                      | 10,000 | 5,000   | 15,000  |
|    | - Visite Dokter   | 5,000  | 10,000  | 15,000  |

## 2. Tindakan Medis Umum

| No | Jenis Pelayanan                       | Jasa Puskesmas | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1. | Luka Jahit                            | 10,000         | 10,000         | 20,000    |
| 2. | Sirkumsisi                            | 25,000         | 25,000         | 50,000    |
| 3. | Incisi                                | 10,000         | 10,000         | 20,000    |
| 4. | Luka Bakar dibawah 10% Tdk komplikasi | 5,000          | 5,000          | 10,000    |
| 5. | Pasang Tindik                         | 2,500          | 2,500          | 5,000     |



**3. Tindakan Gigi**

| No | Jenis Pelayanan      | Jasa Puskesmas | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|----------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1. | Pencabutan Gigi Susu | 4,000          | 4,000          | 8,000     |
| 2. | Pencabutan Gigi      | 6,500          | 6,500          | 13,000    |
| 3. | Incisi Abses         | 2,500          | 2,500          | 5,000     |
| 4. | Tumpatan Gigi        | 2,500          | 2,500          | 5,000     |
| 5. | Scalling             | 2,500          | 2,500          | 5,000     |

**4. Tindakan KB**

| No | Jenis Pelayanan           | Jasa Puskesmas | Jasa Pelayanan | Nilai  |
|----|---------------------------|----------------|----------------|--------|
| 1. | Suntikan                  |                |                |        |
|    | - Sesuai Standar Wilayah: |                |                |        |
|    | Wilayah I                 | 5,000          | 5,000          | 10,000 |
|    | Wilayah II                | 4,000          | 4,000          | 8,000  |
|    | Wilayah III               | 2,500          | 2,500          | 5,000  |
| 2. | IUD / Implant             | 6,500          | 6,500          | 13,000 |

**5. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**

| No | Jenis Pelayanan   | Jasa Puskesmas | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1. | Darah             |                |                |           |
|    | - Hitung Jenis    | 1,000          | 1,000          | 2,000     |
|    | - Haemoglobin     | 1,000          | 1,000          | 2,000     |
|    | - Golongan Darah  | 1,500          | 1,500          | 3,000     |
|    | - Malaria         | 1,000          | 1,000          | 2,000     |
|    | - BBS             | 2,500          | 2,500          | 5,000     |
|    | - Leukosit        | 1,500          | 1,500          | 3,000     |
| 2. | Urine             |                |                |           |
|    | - Urobilin/Bill   | 1,000          | 1,000          | 2,000     |
|    | - Glukose         | 1,000          | 1,000          | 2,000     |
|    | - Test Hetianutan | 15,000         | 15,000         | 30,000    |

|    |                           |       |       |       |
|----|---------------------------|-------|-------|-------|
| 3. | Protein                   | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 4. | Cairan & Jaringan Lainnya |       |       |       |
|    | - BTA                     | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
|    | - GO                      | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 5  | Tinja                     |       |       |       |
|    | - Fisik Faeces            | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
|    | - Parasit Faeces          | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
|    | - Darah Faeces            | 1,000 | 1,000 | 2,000 |

**6. Pemeriksaan Kesehatan Dengan Surat Keterangan Kesehatan**

| No | Jenis Pelayanan  | Jasa Puskesmas | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1. | Untuk Pekerjaan  | 8,000          | 8,000          | 16,000    |
| 2. | Untuk Pendidikan | 4,000          | 4,000          | 8,000     |

**7. Tarif Transportasi Ambulan**

| No | Jenis Pelayanan | Unit Cost |                | Jasa Puskesmas | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|    |                 | 0-5 Km    | Kelipatan 5 Km |                |                |           |
| 1. | Rujukan Ambulan | 5,000     | 2,000          | 50%            | 50%            |           |

**D. PELAYANAN KLINIK BERSALIN**

**1. Rawat Jalan (Kode RJ)**

| No | Jenis Pelayanan              | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|------------------------------|-------------|----------------|--------|
| 1. | Poli Dokter Spesialis        |             |                |        |
|    | a. Lama                      | 6,000       | 17,000         | 23,000 |
|    | b. Baru                      | 6,000       | 17,000         | 26,000 |
| 2. | Poli Dokter Umum             |             |                |        |
|    | a. Lama                      | 3,000       | 9,000          | 12,000 |
|    | b. Baru                      | 6,000       | 9,000          | 15,000 |
| 3. | Asuhan Keperawatan/Kebidanan | 1,000       | 2,000          | 3,000  |

**2. Rawat Inap (Kode RI)**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Makanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|---------|-----------|
| 1. | VIP             | 30,000      | 85,000         | 45,000  | 160,000   |
| 2. | Kelas I         | 12,000      | 36,000         | 38,000  | 86,000    |
| 3. | Kelas II        | 9,000       | 15,000         | 30,000  | 54,000    |

**3. Persalinan Normal/Tanpa Penyulit (Kode PN)**

**a. Oleh Bidan**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 200,000     | 800,000        | 1,000,000 |
| 2. | Kelas I         | 150,000     | 600,000        | 750,000   |
| 3. | Kelas II        | 100,000     | 400,000        | 500,000   |

**b. Oleh Dokter**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 200,000     | 1,000,000      | 1,200,000 |
| 2. | Kelas I         | 150,000     | 750,000        | 900,000   |
| 3. | Kelas II        | 100,000     | 500,000        | 600,000   |

**c. Oleh Dokter Spesialis**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 200,000     | 1,200,000      | 1,400,000 |
| 2. | Kelas I         | 150,000     | 1,000,000      | 1,150,000 |
| 3. | Kelas II        | 100,000     | 550,000        | 650,000   |

**4. PERSALINAN PENYULIT (Kode PP)**

**a. Oleh Dokter**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 250,000     | 1,200,000      | 1,450,000 |
| 2. | Kelas I         | 200,000     | 950,000        | 1,150,000 |
| 3. | Kelas II        | 150,000     | 650,000        | 800,000   |

**b. Oleh Dokter Spesialis**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 250,000     | 1,500,000      | 1,750,000 |
| 2. | Kelas I         | 200,000     | 1,200,000      | 1,400,000 |
| 3. | Kelas II        | 150,000     | 800,000        | 950,000   |

**5. PERSALINAN ABNORMAL/SEKSIO SESARIA (Kode PA)**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 250,000     | 1,700,000      | 1,950,000 |
| 2. | Kelas I         | 200,000     | 1,500,000      | 1,700,000 |
| 3. | Kelas II        | 150,000     | 1,000,000      | 1,150,000 |

**6. ANASTESIA SEDANG (Kode AS)**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 90,000      | 300,000        | 390,000   |
| 2. | Kelas I         | 75,000      | 250,000        | 325,000   |
| 3. | Kelas II        | 60,000      | 200,000        | 260,000   |

**7. ANASTESIA BESAR (Kode AB)**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 150,000     | 500,000        | 650,000   |
| 2. | Kelas I         | 120,000     | 400,000        | 520,000   |
| 3. | Kelas II        | 90,000      | 350,000        | 440,000   |

**8. TERAPI MEDIK NON OPERATIF & VISITE KONSULASI MEDIK (Kode VKM)**

| No | Jenis Pelayanan  | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|------------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | Dokter Spesialis |             |                |           |
|    | a. VIP           | 15,000      | 60,000         | 75,000    |
|    | b. Kelas I       | 13,000      | 40,000         | 53,000    |
|    | c. Kelas II      | 7,000       | 25,000         | 32,000    |
| 2. | Dokter Umum      |             |                |           |
|    | a. VIP           | 7,000       | 25,000         | 32,000    |
|    | b. Kelas I       | 6,000       | 20,000         | 26,000    |
|    | c. Kelas II      | 3,500       | 12,500         | 16,000    |

**9. PERAWATAN PERINATAL (Kode PPn)**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 17,000      | 20,000         | 37,000    |
| 2. | Kelas I         | 15,000      | 17,000         | 32,000    |
| 3. | Kelas II        | 12,000      | 15,000         | 27,000    |

**10. TINDAKAN MEDIK KECIL (Kode TMK)**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 35,000      | 110,000        | 145,000   |
| 2. | Kelas I         | 27,000      | 85,000         | 112,000   |
| 3. | Kelas II        | 25,000      | 70,000         | 95,000    |

**11. TINDAKAN MEDIK SEDANG (Kode TMS)**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 200,000     | 850,000        | 1,050,000 |
| 2. | Kelas I         | 150,000     | 670,000        | 820,000   |
| 3. | Kelas II        | 100,000     | 550,000        | 650,000   |

**12.TINDAKAN MEDIK BESAR (Kode TMB)**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 200,000     | 1,500,000      | 1,700,000 |
| 2. | Kelas I         | 150,000     | 1,100,000      | 1,250,000 |
| 3. | Kelas II        | 100,000     | 900,000        | 1,000,000 |

**13.PELAYANAN OKSIGEN (Kode PO)**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | Per Strip Skala | 5,000       | 8,000          | 13,000    |

**14.PELAYANAN TRANSPORTASI AMBULAN (Kode PTA)**

| No  | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|-----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1.  | 0 – 5 Km / TP   | 5,000       | 10,000         | 15,000    |
| 2.  | 6 - 10 Km / Tp  | 10,000      | 20,000         | 30,000    |
| 3.  | 11 - 15 Km / Tp | 15,000      | 30,000         | 45,000    |
| 4.  | 16 - 20 Km / Tp | 20,000      | 40,000         | 60,000    |
| 5.  | 21 - 25 Km / Tp | 25,000      | 50,000         | 75,000    |
| 6.  | 26 - 30 Km / Tp | 30,000      | 60,000         | 90,000    |
| 7.  | 31 - 35 Km / Tp | 35,000      | 70,000         | 105,000   |
| 8.  | 36 - 40 Km / Tp | 40,000      | 80,000         | 120,000   |
| 9.  | 41 - 45 Km / Tp | 45,000      | 90,000         | 135,000   |
| 10. | 46 - 50 Km / Tp | 50,000      | 100,000        | 150,000   |
| 11. | 51 - 55 Km / Tp | 55,000      | 110,000        | 165,000   |
| 12. | 56 - 60 Km / Tp | 60,000      | 120,000        | 180,000   |
| 13. | 61 - 65 Km / Tp | 65,000      | 130,000        | 195,000   |
| 14. | 66 - 70 Km / Tp | 70,000      | 140,000        | 210,000   |
| 15. | 71 - 75 Km / Tp | 75,000      | 150,000        | 225,000   |
| 16. | 76 - 80 Km / Tp | 80,000      | 160,000        | 240,000   |

|     |                   |         |         |         |
|-----|-------------------|---------|---------|---------|
| 17. | 81 - 85 Km / Tp   | 85,000  | 170,000 | 255,000 |
| 18. | 86 - 90 Km / Tp   | 90,000  | 180,000 | 270,000 |
| 19. | 91 - 95 Km / Tp   | 95,000  | 190,000 | 285,000 |
| 20. | 96 - 100 Km / Tp  | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| 21. | 101 - 105 Km / Tp | 105,000 | 210,000 | 315,000 |
| 22. | 106 - 110 Km / Tp | 110,000 | 220,000 | 330,000 |
| 23. | 111 - 115 Km / Tp | 115,000 | 230,000 | 345,000 |
| 24. | 116 - 120 Km / Tp | 120,000 | 240,000 | 360,000 |
| 25. | 121 - 125 Km / Tp | 125,000 | 250,000 | 375,000 |
| 26. | 126 - 130 Km / Tp | 130,000 | 260,000 | 390,000 |
| 27. | 131 - 135 Km / Tp | 135,000 | 270,000 | 405,000 |
| 28. | 136 - 140 Km / Tp | 140,000 | 280,000 | 420,000 |
| 29. | 141 - 145 Km / Tp | 145,000 | 290,000 | 435,000 |
| 30. | 146 - 150 Km / Tp | 150,000 | 300,000 | 450,000 |
| 31. | 151 - 155 Km / Tp | 155,000 | 310,000 | 465,000 |
| 32. | 156 - 160 Km / Tp | 160,000 | 320,000 | 480,000 |
| 33. | 161 - 165 Km / Tp | 165,000 | 330,000 | 495,000 |
| 34. | 166 - 170 Km / Tp | 170,000 | 340,000 | 510,000 |
| 35. | 171 - 175 Km / Tp | 175,000 | 350,000 | 525,000 |
| 36. | 176 - 180 Km / Tp | 180,000 | 360,000 | 540,000 |
| 37. | 181 - 185 Km / Tp | 185,000 | 370,000 | 555,000 |
| 38. | 186 - 190 Km / Tp | 190,000 | 380,000 | 570,000 |
| 39. | 191 - 195 Km / Tp | 195,000 | 390,000 | 585,000 |
| 40. | 196 - 200 Km / Tp | 200,000 | 400,000 | 600,000 |
| 41. | 201 - 205 Km / Tp | 205,000 | 410,000 | 615,000 |
| 42. | 206 - 210 Km / Tp | 210,000 | 420,000 | 630,000 |
| 43. | 211 - 215 Km / Tp | 215,000 | 430,000 | 645,000 |
| 44. | 216 - 220 Km / Tp | 220,000 | 440,000 | 660,000 |
| 45. | 221 - 225 Km / Tp | 225,000 | 450,000 | 675,000 |

|     |                   |         |         |         |
|-----|-------------------|---------|---------|---------|
| 46. | 226 - 230 Km / Tp | 230,000 | 460,000 | 690,000 |
| 47. | 231 - 235 Km / Tp | 235,000 | 470,000 | 705,000 |
| 48. | 236 - 240 Km / Tp | 240,000 | 480,000 | 720,000 |
| 49. | 241 - 245 Km / Tp | 245,000 | 490,000 | 735,000 |
| 50. | 246 - 250 Km / Tp | 250,000 | 500,000 | 750,000 |
| 51. | 251 - 255 Km / Tp | 255,000 | 510,000 | 765,000 |
| 52. | 256 - 260 Km / Tp | 260,000 | 520,000 | 780,000 |
| 53. | 261 - 265 Km / Tp | 265,000 | 530,000 | 795,000 |
| 54. | 266 - 270 Km / Tp | 270,000 | 540,000 | 810,000 |
| 55. | 271 - 275 Km / Tp | 275,000 | 550,000 | 825,000 |
| 56. | 276 - 280 Km / Tp | 280,000 | 560,000 | 840,000 |
| 57. | 281 - 285 Km / Tp | 285,000 | 570,000 | 855,000 |
| 58. | 286 - 290 Km / Tp | 290,000 | 580,000 | 870,000 |
| 59. | 291 - 295 Km / Tp | 295,000 | 590,000 | 885,000 |
| 60. | 296 - 300 Km / Tp | 300,000 | 600,000 | 900,000 |

**15. TINDAKAN MEDIK SEDERHANA (Kode TMSH)**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 7,000       | 23,000         | 30,000    |
| 2. | Kelas I         | 7,000       | 18,000         | 25,000    |
| 3. | Kelas II        | 7,000       | 13,000         | 20,000    |

**16. PELAYANAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. | VIP             | 9,000       | 25,000         | 34,000    |
| 2. | Kelas I         | 6,000       | 19,000         | 25,000    |
| 3. | Kelas II        | 5,000       | 14,000         | 19,000    |



**17. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAKNOSTIK**

| <b>No</b> | <b>Jenis Pelayanan</b>       | <b>Jasa Sarana</b> | <b>Jasa Pelayanan</b> | <b>Retribusi</b> |
|-----------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 1.        | Pemeriksaan Elektronik (USG) | 10,000             | 25,000                | 35,000           |
| 2.        | Pemeriksaan Laboratorium     |                    |                       |                  |
|           | a. Darah                     |                    |                       |                  |
|           | - Hemoglobin                 | 2,500              | 7,500                 | 10,000           |
|           | - Lekosit                    | 2,500              | 7,500                 | 10,000           |
|           | - Differensiasi              | 2,500              | 7,500                 | 10,000           |
|           | - LED                        | 2,500              | 7,500                 | 10,000           |
|           | - Hematokrit / PCV           | 2,500              | 7,500                 | 10,000           |
|           | - Trombosit                  | 2,500              | 7,500                 | 10,000           |
|           | - Golongan Darah             | 5,000              | 10,000                | 15,000           |
|           | - Widal                      | 10,000             | 20,000                | 30,000           |
|           | - Malaria ( DDR )            | 2,500              | 7,500                 | 10,000           |
|           | - Gula Darah                 | 5,000              | 15,000                | 20,000           |
|           | b. Urine                     |                    |                       |                  |
|           | - Urine Lengkap              | 5,000              | 10,000                | 15,000           |
|           | - PP Test                    | 10,000             | 15,000                | 25,000           |

**BAB VII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Kabupaten Berau

**BAB VIII**

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil Pelayanan Kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Biaya pasien yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pasien atau keluarga pasien atau pihak peminjam.
- (3) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (4) Retribusi yang telah diterima oleh Puskesmas Pembantu dan Poskesdes diterima oleh bendaharawan penerima puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (5) Retribusi yang telah diterima disetorkan ke bendahara penerima Dinas Kesehatan.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah sebagai pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (2) Biaya Operasional, Jasa Pelayanan, Pemeliharaan dan Pengadaan Bahan penunjang sepenuhnya dibiayai oleh APBD.

## **BAB XI**

### **PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 14**

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak penjamin diberikan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta asuransi kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Nota Kesepahaman (MOU) yang dibuat oleh penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin dengan Kepala Dinas.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin sebagaimana pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai retribusi.

## **BAB XII**

### **KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. Masa retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati atau pejabat.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (1) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (2) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (3) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB XV**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Masa retribusi adalah untuk satu kali pelayanan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XVII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVIII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB XIX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 24**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pelayanan Kesehatan yang sedang berjalan, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB XXIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 10 Pebruari 2012

BUPATI BERAU,

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

**H. JONIE MARHANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

**SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM**

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008